

ARTIKEL 1

KERJA SAMA *REGIONAL
COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP*OLEH: SONYA CLARISSA DAN DADAN GANDARA¹

Pada 15 November 2020, 15 negara yang terdiri dari negara ASEAN, Jepang, Australia, New Zealand, Korea Selatan, dan Tiongkok, menandatangani perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). RCEP merupakan kesepakatan perdagangan wilayah terbesar di dunia (*mega Free Trade Agreement*), yang digagas oleh Indonesia pada 2011 saat periode keketuaan Indonesia di ASEAN. Pembentukan RCEP dilandasi semangat untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi di kawasan, serta berkontribusi dalam meminimalkan kesenjangan ekonomi.

Kerja sama RCEP menyatukan perekonomian di kawasan sebesar USD24,7

triliun atau 30,2% PDB dunia (2019), lebih besar dari *North America Free Trade Agreement/NAFTA* (28,4%) dan EU-27 (18,2%). Sementara itu, investasi langsung yang masuk ke kawasan RCEP (FDI *inflow*) mencapai USD379,9 miliar (29,8%), lebih besar dari NAFTA (29,1%) maupun *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP* (19,6%). Dengan total populasi negara anggota RCEP yang mencapai 30,2% populasi dunia, tercapainya kesepakatan RCEP memberikan optimisme baru bagi pemulihan ekonomi pascapandemi di kawasan melalui integrasi ekonomi yang lebih dalam serta peningkatan standar hidup masyarakat.

Kerja sama RCEP merupakan perjanjian yang sangat strategis bagi

¹ Bank Indonesia, Departemen Internasional, Divisi Hubungan Internasional 3

Indonesia. Hal ini ditandai dengan nilai ekspor Indonesia ke RCEP yang mewakili 61,6% dari total ekspor RI. Impor Indonesia dari RCEP juga cukup besar, mencapai 71,4% dari total impor, sedangkan nilai investasi dari kawasan RCEP yang masuk ke Indonesia mencapai 66,5% dari total FDI *inflow*. Selain itu, di tengah tantangan yang dihadapi dunia usaha akibat pandemi COVID-19, RCEP diharapkan dapat memberikan alternatif sumber pasokan bahan baku yang lebih luas untuk menghindari terjadinya gangguan pasokan bahan baku. Dengan kesinambungan bahan baku yang lebih terjaga, kinerja ekspor ke depan diharapkan akan lebih baik.

Secara umum, terdapat sejumlah potensi manfaat yang dapat diraih Indonesia melalui RCEP, antara lain yaitu: i) terbukanya akses pasar barang, jasa, dan investasi di negara mitra melalui pengurangan hambatan ekspor baik tarif maupun nontarif, serta reformasi ekonomi yang dilakukan di masing-masing negara sehingga berdampak positif pada peningkatan daya saing; ii) menciptakan lingkungan usaha yang *business friendly*, adil dan fasilitatif; iii) mendorong tumbuhnya industri dalam negeri sebagai bagian dari *Global Value Chain* (GVC), serta mendorong *Regional Production Network* dan *Regional Value Chain* (RVC); dan iv) meningkatkan aliran investasi langsung. Sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa secara historis negara yang berperan cukup besar dalam GVC akan mengalami peningkatan aliran investasi asing langsung ke negara tersebut. Untuk itu, Indonesia perlu memastikan agar seluruh

pelaku usaha, termasuk pelaku UMKM, siap dan mampu bersaing untuk memanfaatkan peluang RCEP, termasuk menjadi bagian dari GVC atau RVC.

Saat ini, RCEP merupakan perjanjian yang paling komprehensif dijalin ASEAN baik dari segi cakupan maupun tingkat komitmen dibandingkan perjanjian ASEAN+1 lainnya. Sebelum RCEP, sebagai salah satu negara ASEAN, Indonesia telah menjalin tujuh *Free Trade Agreement* (FTA) pada tingkat regional yaitu: ATIGA (ASEAN *Trade in Goods*), AANZFTA (ASEAN-Australia-New Zealand FTA), ACFTA (ASEAN-China FTA), AJCEP (ASEAN-Japan CEP), AIFTA (ASEAN-India FTA), AKFTA (ASEAN-Korea FTA), dan AHKFTA (ASEAN-Hong Kong FTA). Dalam kaitan ini, perjanjian RCEP menyempurnakan manfaat yang ada dalam perjanjian ASEAN+1 sebelumnya. Perjanjian RCEP terdiri dari 20 bab dan 17 *annexes* yang mengatur perdagangan barang, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, standar dan kesesuaian, *Sanitary and Phytosanitary* (SPS), pengamanan perdagangan, jasa, investasi, kekayaan intelektual, niaga elektronik (*e-commerce*), kerja sama ekonomi dan teknis, pengadaan barang pemerintah, penyelesaian sengketa, finansial, dan telekomunikasi. Secara singkat, substansi perjanjian RCEP mencakup tiga aspek penting yaitu:

- a. Akses pasar: baik untuk perdagangan barang, jasa (termasuk sektor keuangan), maupun investasi;

- b. *Rules*: meliputi *general exceptions; final provision; institutional provision; trade remedies; rules of origin and product specific rules; custom procedures and trade facilitation; sanitary and phytosanitary; standards, technical regulations and conformity assessment procedures*, kekayaan intelektual, kompetisi, *electronic commerce, movement on natural persons, government procurement*, dan *dispute settlement*.
- c. *Cooperation*: mencakup kerja sama di bidang *Small and Medium Enterprises* (mendukung program kerja sama ekonomi berbasis potensi UKM, mendorong *sharing* informasi terkait regulasi, info bisnis, dll) serta *economic and technical cooperation (platform* untuk memberikan bantuan teknis dan program peningkatan kapasitas bagi pembangunan yang inklusif, efektif dan efisien, dengan prioritas pada pihak yang paling membutuhkan).

Perjanjian RCEP akan mengeliminasi tarif bea masuk barang antarnegara anggota secara bertahap. Sebagai gambaran umum, sekitar 65% pos tarif akan langsung dieliminasi (menjadi 0%) saat RCEP berlaku efektif, 15% pos tarif dalam jangka waktu 10 tahun setelah berlaku efektif, dan sisanya bertahap dalam jangka waktu 10-20 tahun setelah perjanjian berlaku efektif (Tabel 1. Tingkat Eliminasi Tarif Bea Masuk dalam Sejumlah Perjanjian). Dalam kaitan ini, nilai tambah kerja sama RCEP dibandingkan kerja

sama ASEAN+1 terletak pada penambahan daftar pos tarif yang sebelumnya ditutup (tidak diliberalisasi)—Tabel 2. Tambahan Pos Tarif dari Negara Mitra untuk ASEAN (dibanding ASEAN+1 FTA). Dengan demikian, kerja sama RCEP dan ASEAN+1 lainnya dapat saling melengkapi dimana setiap negara anggota dapat memilih skema tarif preferensi yang lebih menguntungkan. Di samping eliminasi tarif, perjanjian RCEP juga mengatur terkait hambatan nontarif (*non-tariff measures/ NTMs*) dan mengedepankan konsultasi secara teknis apabila terdapat penerapan NTMs yang dinilai berdampak negatif bagi perdagangan antar-anggota RCEP.

Penandatanganan perjanjian RCEP menjadi signifikan di tengah ketidakpastian implementasi kerja sama CPTPP dan mengirimkan sinyal positif tentang prospek kerja sama multilateral bagi penciptaan perdagangan dunia yang terbuka dan adil. Untuk dapat secara optimal memanfaatkan potensi besar dari kerja sama RCEP, Indonesia perlu meratifikasi perjanjian RCEP terlebih dahulu dan melakukan sosialisasi secara luas kepada pelaku usaha, serta melanjutkan reformasi struktural. Berlanjutnya reformasi struktural diperlukan dalam rangka terus mendorong penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif, yang merupakan prasyarat utama bagi peningkatan daya saing dan produktivitas agar dapat memperoleh manfaat dari kerja sama perdagangan seperti RCEP. Upaya tersebut akan mampu membawa Indonesia berperan lebih besar dalam GVC dan RVC. Pemanfaatan

RCEP secara optimal diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan berkesinambungan, serta terciptanya lapangan kerja dan sumber baru pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1. Tingkat Eliminasi Tarif Bea Masuk dalam Sejumlah Perjanjian

RCEP Members	AANZFTA	ACFTA	AIFTA	AJCEP	AKFTA	RCEP
Brunei	99%	98%	85%	98%	99%	92,5%
Kamboja	89%	90%	88%	85%	91%	87,1%
Indonesia	93%	92%	49%	91%	91%	84,9-91,5%
Laos	92%	97%	80%	86%	90%	85,9%
Malaysia	97%	93%	80%	94%	92%	89,3-90%
Myanmar	88%	94%	77%	85%	92%	86%
Filipina	95%	92%	81%	97%	90%	85,1-91,3%
Singapura	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Thailand	99%	93%	78%	96%	95%	85,2-91,3%
VietNam	95%	92%	79%	94%	89%	85,6-90,3%
Australia	100%	-	-	-	-	92%
Tiongkok	-	95%	-	-	-	83-90,5%
Jepang	-	-	-	92%	-	83-89,5%
Korea	-	-	-	-	90%	83-90,6%
New Zealand	100%	-	-	-	-	85,9-91,8%

Sumber: Kementerian Perindustrian

Tabel 2. Tambahan Pos Tarif Dari Negara Mitra untuk ASEAN (dibanding ASEAN+1 FTA)

Negara	Jumlah	Sektor
Australia	0	-
New Zealand	0	-
Korea	313 PT	Perikanan, Kehutanan, Pertanian, Makanan, Minuman, Kimia
Jepang	127 PT	Perikanan, Perkebunan, Kimia, Makanan, Minuman
Tiongkok	286 PT	Perkebunan, Pertanian, Otomotif, Elektronik, Kimia, Makanan, Minuman, Mesin

Sumber: Kementerian Perindustrian, diolah
Keterangan: Australia dan New Zealand tidak terdapat tambahan akses pasar mengingat dalam AANZFTA akan mencapai 100% tahun ini.

ARTIKEL 2

TRAVEL BUBBLE: UPAYA MEMULIHKAN SEKTOR PARIWISATA

OLEH: MASAGUNG SUKSMONOHADI ¹

Pandemi COVID-19 telah memicu pelemahan pada seluruh sektor ekonomi. Sektor jasa terutama yang memerlukan kontak fisik atau tatap muka, seperti pariwisata, terdampak parah akibat pandemi. Industri yang terkait dengan pariwisata seperti transportasi, hotel, restoran, dan juga usaha UMKM merasakan efek domino dari penerapan kebijakan pembatasan aktivitas yang dilakukan merata di banyak negara. Penurunan aktivitas global yang tajam menyebabkan *shock* pada perekonomian sehingga menimbulkan tekanan pada kondisi keuangan perusahaan dan meningkatkan pengangguran. Sejalan dengan mulai meningkatnya mobilitas, sejumlah negara berupaya memulihkan sektor pariwisata dengan menempuh kebijakan *travel corridor* (*travel bubble*) untuk memudahkan perjalanan bisnis dan pariwisata. Meski demikian,

efektivitas *travel bubble* ini juga akan ditentukan oleh ketersediaan vaksin secara luas, selain kebijakan pemulihan pariwisata yang ditempuh oleh masing-masing negara.

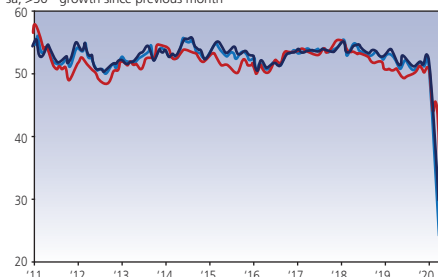
A. Dampak COVID-19

Lockdown ketat yang diterapkan untuk membatasi penyebaran pandemi telah menurunkan kinerja sektor jasa global. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh indikator PMI *Global Services* pada April 2020 yang turun hingga 24,0 (dari 36,8 pada Maret 2020)—terendah sepanjang sejarah. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor jasa yang paling terdampak. United Nation *World Tourism Organization* (UNWTO) mencatat hingga Agustus 2020 pariwisata global berkontraksi -70,1% yoy, kunjungan wisatawan internasional turun sebanyak 700 juta orang atau setara dengan USD730 miliar pendapatan ekspor pariwisata internasional—delapan kali lipat lebih tinggi

¹ Bank Indonesia, Departemen Internasional, Divisi Penelitian dan Asesmen Internasional

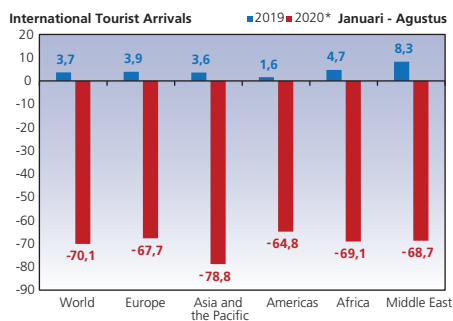
dari kerugian pada saat *Global Financial Crises*. Akibat kondisi tersebut, sekitar 197,5 juta pekerja pada sektor pariwisata berpotensi kehilangan pekerjaan. IMF memperkirakan negara-negara yang memiliki ketergantungan tinggi pada sektor pariwisata berpotensi berkontraksi lebih dalam sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk pulih dari krisis COVID-19.

Composite/Manufacturing/Services (Business Activity)
sa, >50 - growth since previous month



Sumber: J.P Morgan, IHS Markit

Grafik 1. Global Composite PMI

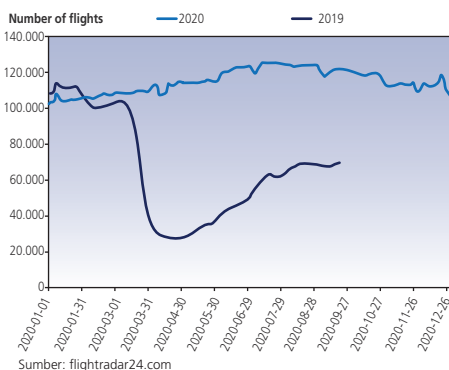


Sumber: World Tourism Organization (UNWTO)

Provisional data

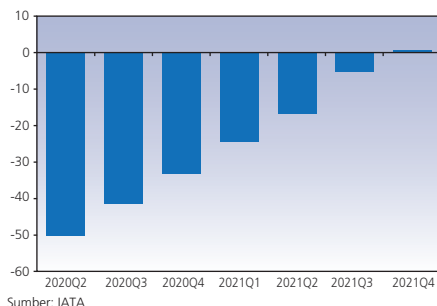
Grafik 2. Perkembangan Kedatangan Turis Global (% yoy)

Berbagai industri pendukung pariwisata, seperti industri penerbangan dan perhotelan terdampak parah akibat COVID-19. Industri ini memiliki keterkaitan *upstream* dan *downstream* yang luas pada sektor jasa dan pariwisata. Data *International*



Sumber: flightrader24.com

Grafik 3. Perkembangan Lalu Lintas Penerbangan Komersial



Sumber: IATA

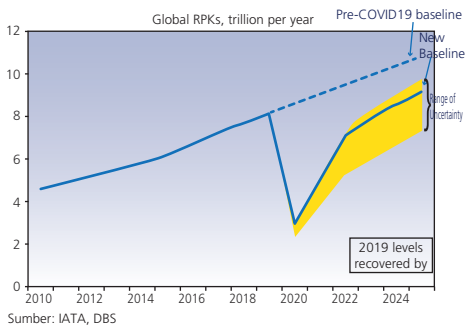
Grafik 4. Proyeksi Cash Burn Industri Penerbangan

Air Transport Association (IATA) menunjukkan bahwa jumlah penumpang pesawat, yang diukur melalui *revenue passenger kilometers* (RPK), berkontraksi hingga 90% pada Agustus 2020, baik untuk penerbangan domestik maupun internasional. Bahkan pada triwulan III 2020, industri penerbangan harus mengeluarkan biaya hingga sekitar USD40 miliar untuk operasional (*cash burn*) di tengah pendapatan yang berkontraksi sangat dalam. Industri penerbangan diperkirakan akan mulai pulih secara gradual pada triwulan IV 2021. Sejumlah hotel terpaksa merumahkan pegawai untuk mengurangi pengeluaran

guna mengatasi penerimaan pendapatan yang terbatas. Kontraksi yang sangat dalam menghadapi perusahaan di industri penerbangan dan perhotelan dalam kondisi keuangan yang sulit.

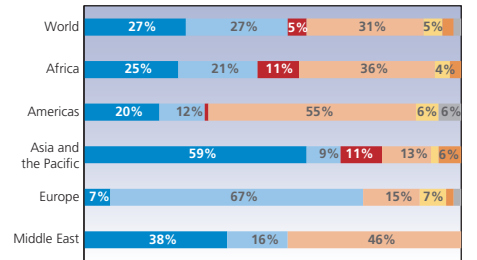
B. Prospek dan Risiko Pemulihan Sektor Pariwisata

Pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas dan ketersediaan vaksin memberikan harapan akan pemulihan kinerja sektor pariwisata global. Pada 1 November 2020, sekitar 70% destinasi wisata global telah melonggarkan restriksi (152 dari 217 destinasi wisata global)—meningkat dari 115 destinasi pada September 2020.² Pelonggaran restriksi terutama dilakukan oleh Kawasan Eropa, Amerika, dan Afrika. Pemberitaan positif mengenai penemuan vaksin juga menambah optimisme pemulihan sektor pariwisata. Pasca kontraksi yang sangat dalam pada triwulan II 2020, *rebound* yang berlangsung pada triwulan III 2020 berpotensi terus membaik terutama jika kasus COVID-19 terkendali.



Grafik 5. Global Travel Outlook

2 UNWTO 8th Report of Travel Restrictions.



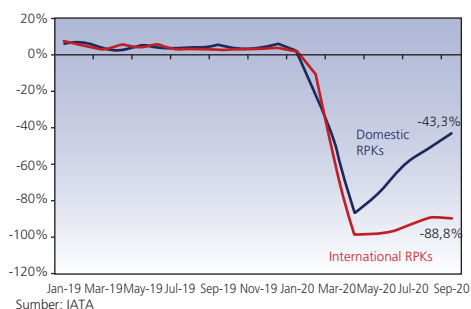
Sumber: UNWTO

■ Complete closure of borders ■ Partial closure of borders ■ Quarantine
 ■ Negative PCR test ■ Destination-specific travel restriction ■ Different measures
 ■ COVID-19 travel restriction lifted

Grafik 6. Perkembangan Pelonggaran Restriksi Perjalanan di Sejumlah Negara

Peningkatan kerja sama *travel corridor* (*travel bubble*) diharapkan dapat menjadi pendorong perbaikan kinerja sektor pariwisata. *Travel bubble* merupakan kesepakatan dua/beberapa negara yang telah berhasil mengontrol penyebaran COVID-19 untuk menciptakan koridor perjalanan yang memudahkan penduduk melakukan perjalanan lintas batas dan menghindari kewajiban karantina mandiri. Sejumlah negara telah menjalin kerja sama *travel bubble* bagi wisatawan, antara lain negara-negara ASEAN, Hong Kong, India, Tiongkok, Australia, dan Jepang. Singapura dan Hong Kong menjadi negara pertama yang menjalin kerja sama untuk perjalanan internasional non-esensial tanpa syarat karantina 14 hari. Seiring dengan jumlah kasus yang relatif rendah dan mekanisme penanganan COVID-19 yang baik, Hong Kong dan Singapura menyepakati kerja sama *two-way travel bubble* pada 15

Oktober 2020.³ Melalui kerja sama tersebut, warga negara Singapura dapat bepergian ke Hong Kong, atau sebaliknya, dengan syarat telah berada di Singapura/Hong Kong selama minimal 14 hari sebelum keberangkatan dan memiliki hasil tes COVID-19 negatif dari fasilitas kesehatan yang diakui oleh otoritas kedua negara. Penerbangan bilateral perdana dijadwalkan pada awal 2021.⁴ Singapura akan terus memperluas kerja sama *travel bubble* dan tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik, antara lain Selandia Baru, Australia, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia.



Grafik 7. Pertumbuhan Perjalanan Udara Domestik dan Internasional

Sejumlah negara lain juga melakukan kerja sama *travel bubble*. Hong Kong tengah

menjajaki kerja sama antara lain dengan Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Prancis, Jerman, dan Swiss. Selain itu, Thailand dan Tiongkok juga tengah melakukan peninjauan *two-way travel bubble* yang ditargetkan mulai berlaku pada awal 2021. Kerja sama *travel bubble* untuk keperluan esensial sudah lebih banyak diadopsi antara lain oleh India dengan 18 negara mitra di Asia dan Eropa, Jepang dengan sejumlah negara ASEAN (Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapura, Vietnam), serta Indonesia dengan Uni Emirat Arab, Korea Selatan, dan Singapura.

Kerja sama *travel bubble* dinilai sebagai *safe start* untuk pemulihan sektor pariwisata internasional. Sejumlah negara menjalin kerja sama *travel bubble* dengan beberapa pertimbangan, antara lain jumlah kasus COVID-19 negara mitra yang menurun/terkendali, kualitas fasilitas kesehatan dan infrastruktur kebersihan yang baik, serta mekanisme penanganan *outbreak* yang *robust*. Negara yang melakukan peninjauan kerja sama *travel bubble* makin meningkat, khususnya di kawasan Asia Pasifik, meski implementasinya masih terkendala oleh peningkatan kembali jumlah kasus COVID-19 di sejumlah negara.

Keberhasilan implementasi *travel bubble* akan dipengaruhi oleh tingkat penyebaran virus dan ketersediaan vaksin. Peningkatan jumlah kasus di sejumlah negara Eropa dan Asia menjadi salah satu tantangan yang dapat menunda rencana pembukaan

³ *Two-way travel bubble* mencerminkan pembebasan syarat karantina berlaku di kedua negara, berbeda dengan *one-side travel bubble* yang dijalin oleh Australia dengan Selandia Baru (NZ). Dalam kerja sama *one-side travel bubble*, Pemerintah Australia mengizinkan orang bepergian dari NZ menuju negara bagian New South Wales dan Northern Territory tanpa karantina. Namun, saat kembali ke NZ harus melakukan karantina 14 hari dengan biaya pribadi.

⁴ Ditunda dari rencana semula 22 November 2020, seiring peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Hong Kong.

perjalanan internasional. Proses distribusi vaksin yang memerlukan *cold-chain logistic* juga akan menyebabkan perbedaan kecepatan distribusi vaksinasi antara negara maju dan berkembang. Selain itu, ketersediaan vaksin juga tidak secara langsung dapat memulihkan kepercayaan masyarakat untuk kembali melaksanakan perjalanan wisata.

Penutup

Kerja sama *travel bubble* merupakan salah satu langkah untuk memperbaiki kinerja sektor pariwisata global. Negara yang menjajaki skema kerja sama *travel bubble* kian bertambah, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Meski demikian, keberhasilan implementasi *travel bubble* akan dipengaruhi oleh kemampuan pengendalian virus, efektivitas vaksin, dan kepercayaan wisatawan untuk kembali bepergian. Selama minat masyarakat untuk bepergian masih lemah, baik untuk perjalanan bisnis maupun wisata, tetap diperlukan dukungan stimulus pemerintah pada sektor pariwisata, antara lain relaksasi kebijakan makroprudensial, serta dukungan finansial kepada perusahaan pariwisata, UMKM, dan para pekerja. Secara paralel, juga perlu dilakukan upaya untuk membangun kepercayaan wisatawan dengan menyediakan informasi yang transparan dan terpercaya terkait kondisi keamanan dan kesehatan di suatu negara, serta memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan promosi pariwisata.

Referensi:

1. DBS. Group Research. "Travel Recovery on the Horizon". 2020. Diakses dari <https://researchwise.dbsvresearch.com/ResearchManager/DownloadResearch.aspx?E=fihhjkhaa>
2. IATA. "IATA Economic's Chart of the Week: Vaccines may bring end to cash burn by the end of 2021". 2020. Diakses dari <https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/vaccines-may-bring-end-to-cash-burn-by-the-end-of-2021/>
3. IHS Markit. "Global economy suffers worst month in PMI history as output, new orders and employment all fall at record rates". 2020. Diakses dari <https://ihsmarkit.com/research-analysis/global-manufacturing-pmi-at-11year-low-in-april-as-only-china-reports-growth-May2020.html>
4. IMF. "World Economic Outlook, October 2020". 2020. Diakses dari <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020#Full%20Report%20and%20Executive%20Summary>
5. OECD. "COVID-19 and the aviation industry: Impact and policy responses". 2020. Diakses dari <http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-the-aviation-industry-impact-and-policy-responses-26d521c1/>
6. OECD. "Rebuilding tourism for the future: COVID-19 policy responses and recovery". 2020. Diakses dari <http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/rebuilding-tourism-for-the-future-covid-19-policy-responses-and-recovery-bced9859/>
7. UNWTO. "World Tourism Barometer, Volume 18, Issue 6, October 2020". Diakses dari <https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.6>

Halaman ini sengaja dikosongkan

ARTIKEL 3

PANDANGAN POSITIF LEMBAGA *RATING* ATAS PENGESAHAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA DI INDONESIA

OLEH: SHOLIHAH¹

Global Sovereign Credit Rating Action di tengah Tekanan Pandemi COVID-19

Dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian global turut memengaruhi *Sovereign Credit Rating* (SCR) di banyak negara, seiring pemburukan faktor fundamental yang menjadi aspek penilaian lembaga *rating*.² Sepanjang Januari-November 2020, terdapat 119 negara yang mengalami penurunan peringkat *rating*, dan 130 negara yang mengalami perubahan *outlook* menjadi negatif dari tiga lembaga *rating* utama yaitu S&P, Moody's, dan Fitch. Penurunan *rating* dan perubahan *outlook* menjadi negatif ini terjadi di Kawasan (Amerika Latin, Afrika, Eropa, dan Asia Pasifik), dan pada berbagai

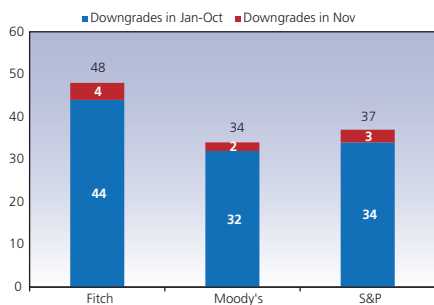
kategori *rating* (terjadi di negara *investment grade* maupun *non-investment grade*)—meskipun dalam beberapa bulan terakhir penurunan *rating* untuk kelompok *non-investment grade* lebih banyak. Afrika Selatan bahkan mengalami penurunan SCR dari dua lembaga *rating* sekaligus pada November 2020, yaitu dari Fitch (menjadi BB- dari BB) dan Moody's (menjadi Ba2 dari Ba1) seiring ekspektasi pelemahan fiskal dalam jangka menengah dan tren pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Dalam konteks Indonesia, di tengah gelombang penurunan *rating*, hingga akhir 2020 Indonesia terbukti mampu mempertahankan peringkat SCR pada peringkat layak investasi atau *investment grade* (tidak mengalami penurunan *rating*) dan hanya mengalami perubahan *outlook* menjadi negatif dari satu lembaga *rating*, yaitu S&P pada April 2020. Sementara,

1 Analis Senior, Bank Indonesia, Departemen Internasional, Divisi Hubungan Investor.

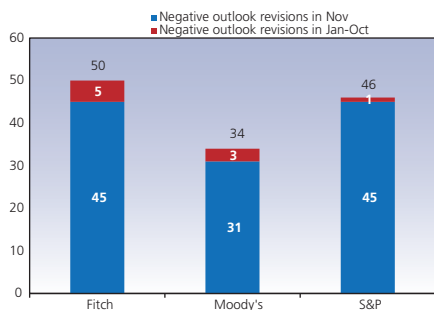
2 Secara umum terdapat lima aspek yang menjadi penilaian lembaga *rating*, yaitu aspek kelembagaan dan tata kelola; aspek ekonomi; aspek eksternal; aspek fiskal; dan aspek moneter.

lembaga *rating* Moody's (Baa2) pada Februari 2020 dan Fitch (BBB) pada Agustus 2020 mempertahankan peringkat SCR serta *outlook* pada tingkat yang stabil.³



Sumber: S&P, Moody's, dan Fitch

Grafik 1. Penurunan SCR-November 2020



Sumber: S&P, Moody's, dan Fitch

Grafik 2. Penurunan Outlook -November 2020

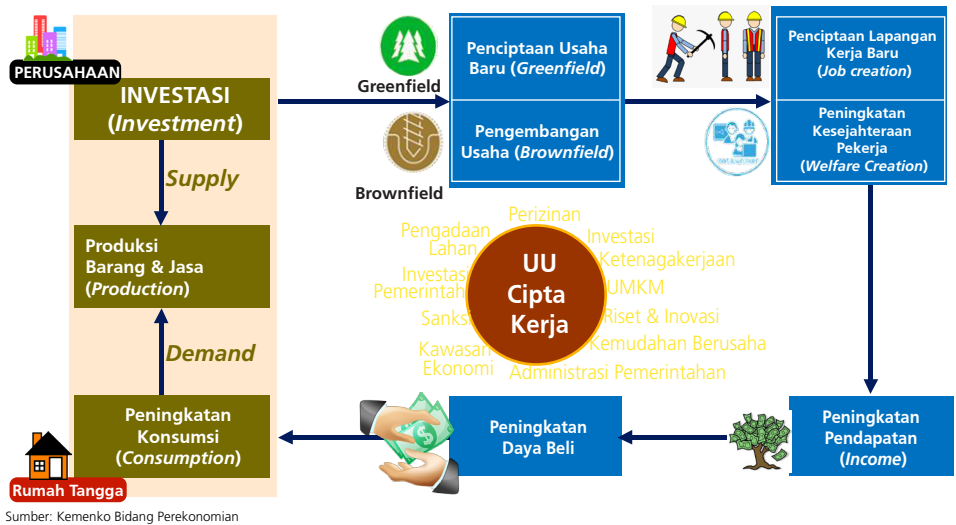
Terdapat sejumlah kecil negara yang justru mengalami *positive rating action* di tengah gelombang penurunan *rating* dan *outlook*, baik dalam bentuk perbaikan *outlook* atau peningkatan *rating*. Pada 25 September 2020, Moody's mengukuhkan SCR Hungaria

pada level Baa3 dan merevisi *outlook* dari stabil menjadi positif, seiring kinerja ekonomi terkini dan prospek yang kuat, serta posisi utang domestik dan eksternal yang relatif lebih baik. Secara umum, terdapat beberapa aspek yang mendorong perbaikan *outlook* menjadi positif bahkan di tengah kondisi pandemi, antara lain (i) kinerja ekonomi dan fiskal sebelum pandemi tercatat baik; (ii) terdapat komitmen kuat dan kredibilitas kebijakan pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19; (iii) terjaganya kredibilitas institusional dan *governance*; (iv) penerapan kebijakan (makro-keuangan) yang proaktif dan fleksibel; (v) tetap berlanjutnya komitmen kehati-hatian pada kebijakan fiskal meskipun keuangan publik dan ekonomi terpukul sementara akibat pandemi COVID-19; serta (vi) terjaganya komitmen reformasi struktural.

Undang Undang (UU) Cipta Kerja sebagai Bentuk Komitmen Indonesia untuk melakukan Reformasi Struktural dinilai Positif oleh Lembaga Rating

Pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 dinilai menjadi aspek positif oleh lembaga *rating* dan menunjukkan terjaganya komitmen reformasi struktural di Indonesia. UU Cipta Kerja atau "*Omnibus Law on Job Creation*" diharapkan dapat mengurai permasalahan yang menghambat investasi. Pembukaan lapangan kerja akan lebih banyak, kesejahteraan pekerja diharapkan dapat meningkat, sehingga dalam jangka menengah memberikan

³ Selain ketiga lembaga *rating* utama dunia tersebut, dua lembaga *rating* Jepang (JCR dan R&I) meningkatkan SCR dari BBB/*outlook* positif menjadi BBB+/*outlook* stabil masing-masing pada Januari dan Maret 2020. Selanjutnya pada Desember 2020, JCR mempertahankan peringkat Indonesia pada BBB+/*outlook* stabil.



Gambar 1. Alur Pikir Undang Undang Cipta Kerja

dampak positif kepada perekonomian Indonesia. Upaya perbaikan iklim investasi dalam UU Cipta Kerja antara lain ditempuh melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, dan penciptaan ekosistem investasi yang kondusif.⁴

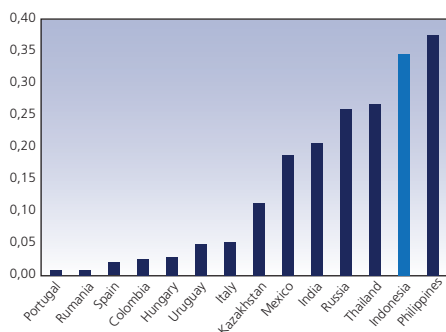
Pengesahan UU Cipta Kerja ditanggapi secara positif oleh lembaga *rating*. Moody's secara khusus menerbitkan publikasi pada 8 Oktober 2020 yang bertajuk *"Omnibus Law will support domestic and foreign investment,*

is credit positive overall". Dalam publikasi dimaksud, Moody's menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja menjadi *credit positive* bagi *sovereign credit rating* Indonesia karena dapat mendukung investasi baik asing maupun domestik (*Foreign Direct Investment-FDI* dan *Domestic Direct Investment-DDI*), dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju level potensial.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kebijakan terkait FDI paling ketat (restriktif) di dunia setelah Filipina (Grafik 3). Ketatnya ketentuan FDI berpotensi membatasi peluang Indonesia untuk memanfaatkan *global supply chain*. Di sisi lain, meskipun Indonesia terus berusaha memperbaiki iklim investasi dan kemudahan berusaha, namun perbaikan peringkat *Ease of*

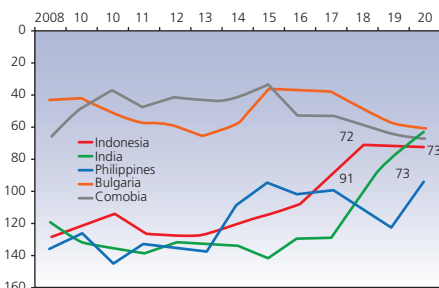
⁴ Secara umum, UU Cipta Kerja terdiri dari sebelas kluster yang mencakup seluruh elemen bagi peningkatan iklim investasi, yaitu (i) peningkatan ekosistem investasi; (ii) perizinan berusaha; (iii) ketenagakerjaan; (iv) dukungan UMKM; (v) kemudahan berusaha; (vi) riset dan inovasi; (vii) pengadaan tanah; (viii) kawasan ekonomi; (ix) investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional; (x) administrasi pemerintahan; dan (xi) penganan sanksi.

Doing Business (EODB) Indonesia yang saat ini berada pada peringkat 73 dari 190 negara, masih di bawah rerata negara dengan *rating* Baa (*peer rating*). Oleh karena itu, Moody's menyambut baik terobosan struktural yang ditempuh Indonesia melalui UU Cipta Kerja untuk mendorong iklim investasi yang lebih baik.



Sumber: Moody's

Grafik 3. OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index, 2019



Sumber: World Bank, Doing Business 2020 Report

Grafik 4. Peringkat Ease of Doing Business, 2020

Lembaga *rating* Fitch juga secara khusus menerbitkan publikasi pada 14 Oktober 2020 yang bertajuk "*Indonesia's Reform Package Boosts Growth Prospects.*" Senada dengan asesmen Moody's, Fitch menyebutkan pengesahan UU Cipta Kerja

dipandang dapat membawa perbaikan signifikan bagi iklim usaha dan merupakan batu loncatan bagi pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel di Indonesia, sehingga berpotensi meningkatkan daya saing Indonesia. Reformasi struktural ini akan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih baik untuk memanfaatkan perubahan *global manufacturing supply chain* seiring diversifikasi lokasi usaha di sejumlah korporasi multinasional, termasuk korporasi dari Tiongkok. UU Cipta Kerja juga memberikan sinyal bahwa Indonesia tetap fokus kepada pembangunan ekonomi jangka panjang di tengah tantangan krisis kesehatan.

UU Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional. Berbagai *concern stakeholder* perlu menjadi perhatian untuk dapat memitigasi/mengatasi potensi risiko yang dapat terjadi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan penjelasan secara komprehensif kepada berbagai *stakeholder* terkait detail kebijakan UU Cipta Kerja. Upaya ini diperlukan untuk memastikan bahwa *stakeholder* memahami dengan baik UU dimaksud sehingga dapat mencegah timbulnya informasi asimetris.

Peringkat SCR Indonesia Tetap Terjaga di Tengah Pandemi COVID-19

Di tengah gelombang penurunan *rating* sepanjang 2020, Indonesia terbukti mampu mempertahankan peringkat SCR dari tiga lembaga *rating* utama dunia.

Hal ini tentu saja menunjukkan keyakinan mereka atas kondisi fundamental ekonomi, kredibilitas kebijakan, serta prospek ekonomi ke depan. S&P, sebagai satu-satunya lembaga *rating* yang merevisi *outlook* Indonesia dari stabil menjadi negatif, juga menggarisbawahi dalam laporannya bahwa meskipun *outlook* direvisi menjadi negatif, namun mereka tetap mempertahankan SCR Indonesia pada BBB seiring tatanan kelembagaan yang stabil, prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, dan kebijakan fiskal yang secara historis cukup *prudent*.

Kondisi ini jauh berbeda dengan periode Krisis Keuangan Asia 1997/1998. Pada saat itu, peringkat SCR Indonesia terpuruk hingga berada di sekitar level CCC (*highly speculative rating*). Krisis Keuangan Asia 1997/1998 juga telah memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia untuk terus memperbaiki fundamental ekonomi, menerapkan kebijakan yang kredibel, serta menerapkan berbagai prinsip kehati-hatian untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan. Lebih lanjut, pascakrisis 1997/1998 otoritas di Indonesia secara gradual dan berkesinambungan terus berupaya memperbaiki struktur perekonomian, kelembagaan dan *governance*, serta memperluas penyediaan infrastruktur publik sehingga secara perlahan mampu menempatkan Indonesia pada kelompok negara “layak investasi” atau *investment grade country* dari tiga lembaga *rating* utama

dan mampu mengarungi berbagai turbulensi ekonomi keuangan global yang terjadi sepanjang dua dekade terakhir dengan baik.

Kemampuan Indonesia menjaga peringkat SCR di tengah kondisi pandemi COVID-19 pada 2020 didukung oleh berbagai kebijakan *extra-ordinary* yang ditempuh otoritas pada periode pandemi serta ditopang pula oleh kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia yang terjaga selama dua dekade terakhir. Komitmen tinggi Indonesia untuk terus mengimplementasikan reformasi struktural bahkan di tengah situasi pandemi, sebagaimana ditunjukkan oleh pengesahan UU Cipta Kerja, juga diapresiasi oleh lembaga *rating* dan dinilai sebagai *credit positive*. UU Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan fondasi yang kokoh bagi peningkatan iklim investasi Indonesia yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju lintasan yang lebih tinggi.

Ke depan, kebijakan perlu diarahkan untuk memastikan upaya pemulihan ekonomi yang komprehensif, sinergis, dan proaktif juga ditopang oleh stabilitas makroekonomi. Lebih lanjut, upaya menjaga persepsi positif perekonomian Indonesia melalui penyampaian informasi terkini terkait kondisi perekonomian Indonesia dan respons kebijakan yang diambil otoritas perlu terus dilakukan agar tidak menimbulkan informasi asimetris yang memengaruhi stabilitas sektor keuangan dan makroekonomi.

Tabel 1. Perkembangan SCR Indonesia

Standard & Poor's		Moody's		Fitch	
July 7, 1992	BBB-	March 14, 1994	Baa3	June 1, 1997	BBB-
April 18, 1995	BBB	December 21, 1997	Ba1	December 23, 1997	BB+
October 10, 1997	BBB-	January 9, 1998	B2	January 8, 1998	BB-
December 31, 1997	BB+	March 20, 1998	B3	January 21, 1998	B+
January 9, 1998	BB	September 30, 2003	B2	March 16, 1998	B-
January 27, 1998	B	May 19, 2006	B1	August 1, 2002	B
March 11, 1998	B-	October 22, 2007	Ba3	November 20, 2003	B+
May 15, 1998	CCC+	December 21, 2008	Ba3*	January 27, 2005	BB-
March 29, 1999	SD	June 11, 2009	Ba3***	February 14, 2008	BB
March 30, 1999	CCC+	September 16, 2009	Ba2	January 21, 2009	BB*
September 12, 1999	CCC+	June 21, 2010	Ba2***	January 25, 2010	BB+
October 2, 2000	B-	January 17, 2011	Ba1	February 24, 2011	BB+***
May 21, 2001	CCC+	January 18, 2012	Baa3	December 15, 2011	BBB-
November 2, 2001	CCC	January 28, 2016	Baa3*	November 22, 2012	BBB-*
April 23, 2002	SD	February 8, 2017	Baa3***	November 15, 2013	BBB-*
September 5, 2002	CCC+	April 13, 2018	Baa2	November 13, 2014	BBB-*
May 12, 2003	B-	February 10, 2010	Baa2*	November 6, 2015	BBB-*
October 8, 2003	B			May 23, 2016	BBB-*
December 22, 2004	B+			December 21, 2016	BBB-***
July 26, 2006	BB-			July 19, 2017	BBB-*
November 7, 2008	BB-*			December 20, 2017	BBB
October 23, 2009	BB-***			September 2, 2018	BBB*
March 12, 2010	BB			March 14, 2019	BBB*
April 8, 2011	BB+			January 24, 2020	BBB*
April 23, 2012	BB+*			August 10, 2020	BBB*
May 2, 2013	BB+**				
April 28, 2014	BB+*				
May 21, 2015	BB+***				
June 1, 2016	BB+*				
May 21, 2015	BBB-				
June 1, 2016	BBB-*				
May 19, 2017	BBB-				
May 31, 2018	BBB-*				
May 31, 2019	BBB				
April 17, 2020	BBB****				

Sumber: S&P, Moody's, dan Fitch

Tabel 2. Pemeringkatan Sovereign Credit Rating

Moody's	S&P	Fitch	Keterangan	
Aaa	AAA	AAA	Prime	
Aa1	AA+	AA+	High grade	
Aa2	AA	AA		
Aa3	AA-	AA-		
A1	A+	A+	Upper Medium grade	
A2	A	A		
A3	A-	A-		
Baa1	BBB+	BBB+	Lower Medium grade	
Baa2	BBB+	BBB+		
Baa3	BBB-	BBB-		
Ba1	BB+	BB+	Non Investment Grade Speculative	
Ba2	BB	BB		
Ba3	BB-	BB-		
B1	B+	B+	Highly Speculative	
B2	B	B		
B3	B-	B-		
Caa	CCC+	CCC	Substantial risks	
Ca	CCC		Extremely speculative	
C	CCC-		In default with little prospect for recovery	
/	D	DDD	In default	
/		DD		
/		D		

Sumber: S&P, Moody's, dan Fitch

Halaman ini sengaja dikosongkan

ARTIKEL 4

DUAL CIRCULATION STRATEGY TIONGKOK: PELUANG DAN TANTANGAN BAGI INDONESIA

OLEH: FIRMAN HIDAYAT¹

Pemulihan ekonomi Tiongkok pada semester kedua 2020 berlangsung makin kuat dan *broadbased* seiring terkendalinya wabah COVID-19 di domestik. Ekonomi Tiongkok pada 2020 diperkirakan tumbuh 1,9% (yoy), dan pada 2021 diprediksi tumbuh makin kuat sebesar 8,2% (yoy)². Perkembangan positif ini terjadi di tengah sejumlah tantangan yang tidak ringan, terutama dipicu oleh ketegangan hubungan dengan Amerika Serikat (AS). Pada masa kepemimpinan Presiden Trump, hubungan AS dan Tiongkok mengalami ketegangan di sejumlah area, khususnya terkait isu perdagangan, teknologi, *human rights*, dan *new security law* di Hong Kong. Kemenangan Joe Biden pada pemilu AS berpotensi memperbaiki hubungan perdagangan kedua negara, meskipun hubungan di area lainnya diperkirakan tidak akan berubah signifikan, terutama isu teknologi. Hal ini mengingat

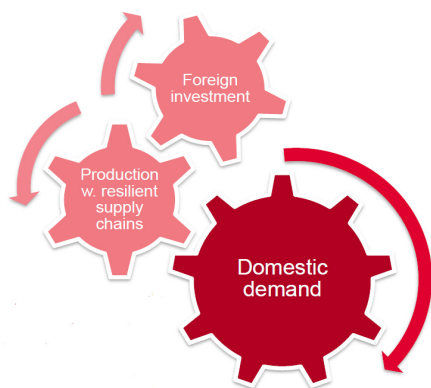
AS akan berupaya mempertahankan kepentingannya di tengah langkah Tiongkok menguasai teknologi dunia.

AS telah mengeluarkan kebijakan yang melarang perusahaan teknologi AS menjual produk *hightech*, terutama *chips*, kepada perusahaan Tiongkok. Kebijakan ini tentunya akan berdampak pada kesinambungan produksi perusahaan teknologi Tiongkok, antara lain Huawei, mengingat perusahaan tersebut masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap produk *chips* dari Amerika Serikat. Kondisi ini menggambarkan bahwa keberlangsungan perusahaan teknologi Tiongkok relatif rentan terhadap dampak kebijakan pembatasan akses terhadap produk teknologi negara maju. Menyadari kondisi itu, Tiongkok pada pertemuan *Politburo Chinese Communist Party* pada Mei 2020 menegaskan akan mengimplementasikan *Dual Circulation Strategy* (DCS). Kebijakan DCS ini merupakan langkah Tiongkok mendorong kemandirian ekonomi domestik,

1 Analis Eksekutif, Bank Indonesia, KPw BI Beijing

2 Sumber: IMF

terutama di sektor teknologi, dan menjadikan permintaan domestik sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Tiongkok juga akan memperkuat kerja sama di kawasan guna mengatasi dampak ketegangan hubungan dengan AS.



Sumber: Societe Generale

Gambar 1 Dual Circulation Strategy: Ekonomi Domestik Sebagai Engine of Growth

Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Tiongkok

Kebijakan DCS dimanifestasikan melalui penetapan sejumlah target pembangunan pada 2021–2025. Pembangunan Tiongkok lima tahun ke depan akan mengusung tema “*progress while maintaining stability*,” yang akan dicapai melalui lima prinsip yaitu inovasi, koordinasi, ramah lingkungan, keterbukaan, dan *sharing*. Meskipun *detail* program lima tahun ke

depan masih dirumuskan oleh Tiongkok, program pembangunan Tiongkok ke depan diperkirakan fokus beberapa area yang akan dapat mendukung pertumbuhan yang lebih berkualitas dan berkesinambungan.

Pertama, melakukan optimalisasi struktur ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih berkualitas dan berkesinambungan. Tiongkok telah menargetkan kenaikan nominal Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi dua kali lipat dan mendorong pertumbuhan PDB per kapita ke level *Middle Developed Economy* (MDE) pada tahun 2035. Sejalan dengan itu, Tiongkok akan meningkatkan kapasitas permintaan domestik dan mendorong kontribusi konsumsi dengan meningkatkan transaksi *online*, mendorong efisiensi perusahaan, meningkatkan pendapatan dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antara urban dan rural, serta mendorong investasi melalui kebijakan “*in China, for China*.”

Kedua, mendorong inovasi dan kemandirian teknologi. Tiongkok akan melanjutkan upaya transisi industri dari *cheap-low-tech-industry* menjadi *high-end and specialized industry*, serta mewujudkan “*tech self sufficiency*.” Terkait itu, Tiongkok akan berupaya meningkatkan kemampuan sektor teknologi melalui peningkatan R&D khususnya di area *artificial intelligence, quantum information, integrated circuits, biological breeding*, dan *aerospace technology*. Tiongkok juga akan melanjutkan *opening up market* dan meningkatkan *market*

access. Hal ini dilakukan dengan mendorong investasi melalui perbaikan mekanisme *national treatment* dan *negative investment list*, meningkatkan *opening up* industri jasa, dan mengoptimalkan ketentuan serta *framework* untuk mendukung *outbound investment*.

Ketiga, mendorong industri manufaktur ke arah industri yang *high-end* dan *intelligent*. Sejumlah kebijakan yang akan ditempuh diantaranya mendorong penggunaan teknologi 5G, meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung teknologi, dan meningkatkan industrialisasi berbasis *digital*. **Keempat**, mengatasi ketimpangan kesejahteraan *urban* dan *rural* yang dipicu oleh tingginya urbanisasi. Langkah yang akan ditempuh antara lain meningkatkan *social security system* dan mengurangi kemiskinan. **Fokus kelima** diarahkan untuk mendorong pembangunan yang ramah lingkungan. Dalam hal ini, Tiongkok telah menargetkan batas toleransi emisi karbon pada 2030 dan bebas emisi karbon pada 2060. Target ini akan dicapai dengan mendorong teknologi *clean energy*, antara lain mobil listrik, *solar panels*, dan *wind turbines*.

Memperkuat Integrasi Ekonomi dan Keuangan di Kawasan

Guna mendukung upaya kemandirian ekonomi domestik, Tiongkok juga berupaya memperkuat integrasi ekonomi dan keuangan di kawasan. Pada 15 November

2020, Tiongkok telah bergabung dalam kerja sama *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) bersama dengan 14 negara lainnya. Bergabungnya Tiongkok mengukuhkan RCEP menjadi blok perdagangan terbesar di dunia, mengalahkan NAFTA dan EU-27. Nilai PDB anggota RCEP bisa mencapai 30,2% dari PDB dunia, lebih besar dibandingkan NAFTA (28,4% dari PDB dunia), dan EU-27 (18,2% dari PDB dunia).

Sejumlah keuntungan akan diperoleh Tiongkok dari blok perdagangan RCEP. Peterson Institute menyebutkan bahwa Tiongkok akan memperoleh *income* sebesar USD100 miliar dari integrasi perdagangan dan produksi dengan negara anggota RCEP. Integrasi dengan negara RCEP juga akan memperkuat *value chain* di kawasan sehingga ekonomi Tiongkok akan lebih tahan terhadap dampak negatif *trade tension* dan *decoupling* negara maju. Selain itu, Tiongkok akan menjadi *center of gravity* dari blok perdagangan RCEP karena memiliki basis produksi dan sekaligus pasar terbesar diantara anggota RCEP. Persiapan di domestik guna menyambut implementasi RCEP telah dimulai Tiongkok dengan mendorong *institutional openness*, mempersiapkan kebijakan pengurangan tarif, *simplifikasi custom procedures*, menjalankan komitmen Tiongkok atas *foreign investment negative list*, dan meningkatkan perlindungan hak intelektual.

Selain RCEP, upaya memperkuat kerja sama di kawasan juga dilakukan dengan memperkuat kerja sama dengan ASEAN. Pada pertemuan China-ASEAN

Expo dan *Business Investment Summit* tanggal 27 November 2020, Presiden Xi kembali menegaskan bahwa Tiongkok akan memprioritaskan kerja sama dengan ASEAN. Komitmen ini akan diwujudkan oleh Tiongkok melalui beberapa langkah, **pertama**, melanjutkan upaya pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas dengan ASEAN, antara lain membangun *New International Land-Sea Trade Corridor, railways, highways, ports, airports, power and communications*. **Kedua**, mendorong kelancaran perdagangan, meningkatkan investasi yang saling menguntungkan, saling membuka pasar, dan mempercepat integrasi industri, serta *supply* dan *value chains*. **Ketiga**, mendorong inovasi dan teknologi serta meningkatkan kerja sama *digital economy*. Kerja sama tersebut akan fokus pada pengembangan *smart city, teknologi 5G, artificial intelligence, e-commerce, big data, blockchain* dan *telemedicine*, serta meningkatkan keamanan data. **Keempat**, memperkuat kerja sama mengatasi wabah COVID-19 dan meningkatkan kapasitas kesehatan publik. Tiongkok berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan ASEAN akan vaksin COVID-19, memberikan dukungan pendanaan bagi COVID-19 ASEAN *Response Fund*, dan meningkatkan kerja sama pelatihan bagi pekerja di sektor kesehatan.

Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia

Di tengah potensi perubahan tatanan globalisasi ke depan, Indonesia

memiliki peluang untuk memperoleh manfaat dari upaya Tiongkok memperkuat kerja sama dengan ASEAN. Indonesia perlu memanfaatkan ASEAN-China *Digital Economy Cooperation* untuk mendorong pembangunan *digital economy, intelligent manufacturing, teknologi 5G, big data, dan smart cities*. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing industri, serta mendukung proses revolusi industri 4.0. di Indonesia.

Indonesia juga dapat mengoptimalkan peluang relokasi *global value chain* (GVC) perusahaan di Tiongkok ke negara-negara di kawasan. Percepatan relokasi GVC ini antara lain dipicu oleh kenaikan upah tenaga kerja di Tiongkok dan akibat *trade tension* dengan AS, serta upaya untuk memperkuat *value chain* di kawasan. Dalam kaitan ini, Indonesia akan menjadi salah satu tujuan menarik bagi investor mengingat iklim investasi akan terus membaik seiring disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Selain itu, Indonesia perlu memanfaatkan potensi kenaikan permintaan nikel sejalan dengan upaya Tiongkok mendorong industri mobil listrik. Kenaikan produksi mobil listrik akan meningkatkan permintaan nikel yang merupakan bahan baku utama baterai mobil listrik. Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, Indonesia perlu memberikan insentif bagi industri pertambangan yang mampu mengolah bijih nikel menjadi produk yang lebih memiliki nilai tambah.

Selain memberikan peluang, implementasi kebijakan DCS Tiongkok juga berpotensi memberikan tantangan bagi Indonesia, terutama terkait *green economy*. Implementasi kebijakan *green economy* Tiongkok berpotensi memengaruhi permintaan batu bara Indonesia. Namun, dampak kebijakan tersebut diperkirakan belum akan terjadi dalam waktu dekat. Hal ini mengingat upaya Tiongkok mengurangi emisi karbon akan dilakukan secara bertahap dan Tiongkok masih akan menoleransi emisi karbon hingga 2030. Meskipun demikian, Indonesia tetap perlu mengantisipasi potensi penurunan permintaan Tiongkok terhadap batu bara Indonesia. Sejumlah kebijakan dapat ditempuh misalnya dengan terus mendorong hilirisasi batu bara khususnya proyek gasifikasi, dan proyek pengolahan batu bara menjadi *Dimethyl Ether* (DME) sebagai substitusi dari *Liquefied Petroleum Gas* (LPG).

Berbagai hal tersebut menunjukkan bahwa peluang Indonesia untuk meraih keuntungan dari kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara di kawasan sangat terbuka lebar. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera berbenah dan mempersiapkan diri sehingga tidak hanya menjadi pasar, namun juga dapat meningkatkan ekspor, menarik investasi, serta mengejar ketertinggalan teknologi. Kerja sama yang dilakukan Indonesia juga harus berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan resiprokal. Selain itu, koordinasi dan sinergi lintas institusi serta antara pusat dan daerah perlu lebih diperkuat sehingga persiapan Indonesia dapat lebih cepat dan efektif. Upaya ini tentunya akan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkesinambungan dan lebih berkualitas.

Halaman ini sengaja dikosongkan